



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, STUDI PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 19 KOTA PALEMBANG PASAL 12 AYAT 2
HURUF (D) JALUR PRESTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

ANDI LALA

Nim : 21.11.189

Program Studi : Administrasi Publik

ABSTRAK

Andi Lala, 2025. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama, Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru, Jurusan Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (I) M. Sattarudin S.Sos.,M.Si dan Pembimbing Pendamping (II) Ir.Heru Adi Putranto, M.Si

Penerimaan peserta didik baru menjadi salah satu dari lingkup utama manajemen kesiswaan, karena dalam proses penerimaan peserta didik baru ini menjadi kegiatan yang penting untuk dikelola dengan baik oleh pihak sekolah guna peningkatan kualitas sekolah. Awal perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan melalui penerapan manajemen kesiswaan adalah dengan perbaikan dari aspek penerimaan peserta didik baru.

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah: Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan sudah baik, karena dilihat dari komunikasinya sudah jelas, sumber dayanya, baik dari SDM, dana, maupun fasilitas sudah memadai. Kemudian dari disposisi semua pihak yang terlihat dalam SPMB menerima dengan baik Peraturan menteri tersebut. Selanjutnya dalam struktur birokrasi ada SOP dan pembagian tugas, hal ini terdapat pada pelaksanaan SPMB dengan jalur prestasi sudah 25% peserta dari jalur prestasi.

Kata Kunci: Implementasi dan Penerimaan Peserta Didik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manajemen kesiswaan adalah proses pengelolaan peserta didik di sekolah mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik, pembinaan yang dilakukan mulai peserta didik masuk sekolah sampai dengan lulus dari sekolah tersebut. Dalam hal ini, manajemen kesiswaan tidak hanya sebagai pencatat data peserta didik, tetapi juga berupaya membantu perkembangan peserta

didik melalui proses pendidikan di sekolah. Manajemen atau pengelolaan kesiswaan ini dimulai dari siswa masuk ke sekolah hingga siswa dinyatakan lulus dari sekolah, bahkan apabila diperlukan ketika menjadi alumni manajemen kesiswaan masih bisa berlangsung atau diterapkan. Manajemen kesiswaan bertujuan mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan dengan harapan kegiatan pembelajaran serta proses pendidikan di sekolah lancar dan teratur.

Fungsi manajemen kesiswaan adalah sebagai tempat untuk siswa mengembangkan diri, baik yang berkenaan dengan individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhannya, potensinya serta prestasi yang dimiliki siswa. Tujuan manajemen kesiswaan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor siswa, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum berupa minat dan bakat serta prestasi siswa, menyalurkan aspirasi serta harapan sekaligus memenuhi kebutuhan siswa dan siswa dapat mencapai kesejahteraan dalam belajar sehingga cita-cita mereka akan tercapai. Tiga lingkup utama dalam manajemen kesiswaan yaitu penerimaan peserta didik baru, kegiatan kemajuan belajar serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

Penerimaan peserta didik baru menjadi salah satu dari lingkup utama manajemen kesiswaan, karena dalam proses penerimaan peserta didik baru ini menjadi kegiatan yang penting untuk dikelola dengan baik oleh pihak sekolah guna peningkatan kualitas sekolah. Awal perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan melalui penerapan manajemen kesiswaan adalah dengan perbaikan dari aspek penerimaan peserta didik baru.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Indonesia yang pada akhirnya memutuskan untuk menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru melalui empat jalur yaitu zonasi, afirmasi, mutasi dan prestasi. Pertimbangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan adanya empat jalur tersebut adalah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru belum bisa dilaksanakan secara optimal di seluruh daerah serta tata cara penerimaan peserta didik baru belum mampu mengkoordinir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat yang terus berkembang. Dinas pendidikan kota Palembang sudah menerapkan empat jalur penerimaan peserta didik baru, yaitu pada jenjang TK dan SD terdapat jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/

wali (mutasi), sedangkan pada jalur SMP terdapat jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/ wali (mutasi) dan jalur prestasi

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SMP di Dinas pendidikan kota Palembang terdapat 4 jalur yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali (mutasi), dan jalur prestasi. Empat jalur pada jenjang SMP tersebut ketentuan-ketentuannya sangat spesifik sekali. Setiap ketentuan jalur penerimaan peserta didik baru termuat dalam petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) Dinas pendidikan kota Palembang. Dalam hal ini, proses penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri di kota Palembang seperti yang dilakukan oleh SMP Negeri 19 kota Palembang diselenggarakan dengan sistem terpusat di Dinas pendidikan kota Palembang, yang situsnya juga sudah disediakan oleh Dinas pendidikan kota Palembang. Namun, sekolah juga melakukan pemantauan akan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Salah satu jalur yang menarik dari keempat jalur yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah adanya jalur prestasi, dalam hal ini peserta didik yang memiliki prestasi di tingkat SD/MI/ sederajat bisa mendaftarkan dalam jalur prestasi, yang mana prestasi ini bisa dimanfaatkan untuk terus dikembangkan dalam lembaga pendidikan selanjutnya. Penerimaan peserta didik baru jalur prestasi dalam proses pendaftaran dibuktikan dengan dokumen resmi bukti peraih prestasi, yang itu mampu membuktikan bahwa peserta didik memiliki kemampuan khusus untuk terus dikembangkan di sekolah dan nantinya akan membuat kualitas sekolah atau lembaga pendidikan itu berkembang melalui peningkatan prestasi siswa.

Berdasarkan hasil observasi sementara penulis pada tanggal 3 Desember 2024 maka, penulis menemukan beberapa indikasi masalah sebagai berikut

1. Titipan

Titipan disini dimaksudkan kepada calon siswa yang sengaja dititip kepada pejabat atau pihak sekolah untuk dapat diterima dengan mudah. Hal ini

menyalahi prinsip objektif, transparan dan berkeadilan.

2. Praktik Jual Beli Kursi

Sama halnya dengan titipan, praktik jual beli kursi kerap terjadi. Orang tua calon siswa memanfaatkan kekayaan untuk membayar ke pihak tertentu supaya anaknya diterima. Tindakan ini tentunya sudah masuk dalam pelanggaran PPDB.

3. Pungutan Liar

Pungutan liar biasanya dilakukan oleh pihak sekolah dengan alibi dana sumbangan atau untuk membeli seragam dan buku tertentu. Hal ini menyalahi prinsip akuntabel.

4. Selain daripada itu, pelanggaran lain adalah penambahan rombongan belajar dan jalur penerimaan tidak sesuai ketentuan. Jika terjadi pelanggaran seperti di atas, maka kumpulkan bukti lalu lakukan pelaporan.

5. Pemalsuan Sertifikat Prestasi

pada jalur prestasi modus dugaan kecurangan saat PPDB berkaitan dengan dugaan manipulasi sertifikat prestasi calon peserta didik. Dugaan Manipulasi tersebut, baik akademik dan non-akademik. Orang tua bekerja sama dengan oknum untuk membuat sertifikat penghargaan dari berbagai lomba yang sebenarnya tidak pernah diikuti oleh anak mereka. Akibat dari kasus ini, beberapa siswa yang benar-benar memiliki prestasi akademik maupun non-akademik terpinggirkan dan tidak mendapatkan tempat di sekolah tujuan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
 - a. Untuk mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa suatu permasalahan terutama masalah Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi
 - b. Menerapkan segala ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1).
2. Bagi Instansi
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang.
 - b. Menjadibahkan sarana dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan ilmu tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi
3. Bagi kampus STIA Satya Negara Palembang
 - a. Sebagai penambah wawasan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru

- b. Sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Riant Nugroho (2004:163), dimana implementasi diartikan sebagai "*getting the job done*" dan "*doing it*". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses atau strategi yang dapat dilakukan dengan mudah. lanjut batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Model Implementasi

Menurut Keban, (2004:63) Pada prinsipnya terdapat dua pemilahan model implementasi kebijakan, yaitu yang pertama,

implementasi kebijakan yang berpola "dari atas ke bawah" (*top-bottom*) dan dari "bawah ke atas" (*bottom-topper*); dan kedua, implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*). Model *mekanisme paksa* adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa di dalam negara dimana tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalangi, namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya. Model mekanisme pasar adalah model yang mengedepankan mekanisme insentif bagi yang menjalangi, dan bagi yang tidak menjalankan tidak mendapatkan sanksi, namun tidak mendapatkan insentif. Model "*top-down*" berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya "*bottom-up*" bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Diantara kedua kutub ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat.

Berikut ini beberapa model implementasi dari beberapa tokoh yang dikutip dari Nugroho (2004: 165).

1. Model Implementasi Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (2008:65)

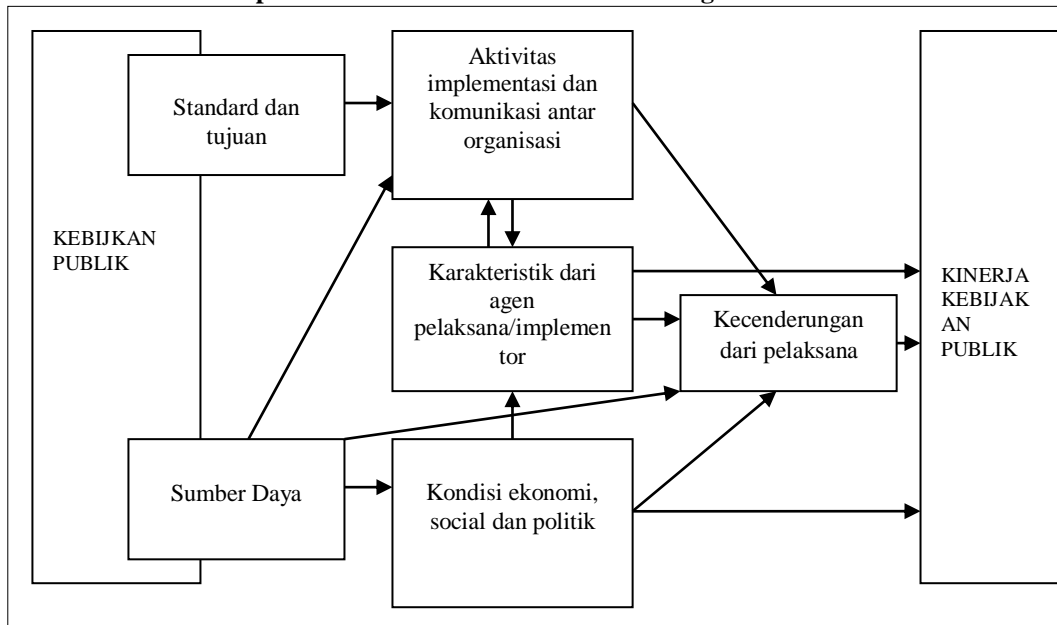
Model kebijakan ini berpola "puncak ke bawah" dan lebih kepada "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Model kebijakan ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier daripada kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat empat variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini

menegaskan pula pendiriannya bahwa bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.

2. Karakteristik dari agen pelaksana/ implementor.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecenderungan dari pelaksana /implemento

Gambar 1
Model Implementasi dari Donald Van Meter dengan Carl Van Horn



Sumber: Riant Nugroho (2004:165)

2. Model Marilee S. Grindle .

Model ini berada pada mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. telah meramalkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Ide dasar Grindle ini adalah bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat tergantung pada *implementability* dari program/kebijakan tersebut.

Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yaitu bagaimana konten (isi) dan

konteks kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

3. Model Implementasi dari George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam Nugroho (2004:168) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu

faktor sumber daya, birokrasi,

a) Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain Menurut teori George C. Edward III Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan

b) Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup:

- a. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas ;
- b. Perintah
- c. Anjuran atasan/pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan

komunikasi, dan disposisi.

mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: Gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

c) Faktor Disposisi (sikap)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

d) Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

Implementasi yang digunakan adalah model Implementasi George C. Edward adalah teori yang mencakup empat faktor seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu implementasi yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang diambil dalam suatu kebijakan dalam sebuah penelitian ini adalah model implementasi George C Edward III mencakup empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. ke empat faktor diatas



dialaksanakan secara bertahap tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang

suatu implementasi kebijakan.

Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK,SD, SMP, SMA, dan SMK PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:

- a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
- b. prestasi dibidang akademik maupun non-akademik.

Menurut Johni (2017:154) PPDB merupakan suatu proses yang biasanya berada di sebuah sekolah yang digunakan untuk menyeleksi calon siswa sesuai dengan indikator yang sudah di tentukan oleh sekolah tersebut untuk menjadi anggota dalam sekolah tersebut. Penerimaan peserta didik baru pada dasarnya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendaftaran siswa-siswi baru, pendataan dan pembagian kelas seorang siswa-siswi. Sehingga dapat terorganisir, teratur dengan cepat, dan tepat dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Proses penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kewajiban pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setiap

tahun ajaran baru. Terdapat dua kategori prestasi yang diakui dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru di sekolah maupun universitas melalui jalur prestasi:

1. Prestasi Akademik
Hasil yang dicapai oleh calon siswa melalui perlombaan atau kompetisi yang berkaitan dengan pendidikan formal. Contohnya, Juara Olimpiade Sains Nasional (OSN), Juara Debat, Juara Pidato, Juara Lomba Cerdas Cermat, Juara Lomba Esai, Juara Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), dan lainnya.
2. Prestasi Non-Akademik
Pencapaian yang berasal dari kompetisi di luar bidang pendidikan formal. Biasanya, prestasi ini dicapai melalui kegiatan ekstrakurikuler atau keanggotaan organisasi dalam lingkungan sekolah. Misalnya, Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Juara Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN), Menghafal Al-Qur'an (Hafiz atau Hafizah), dan sebagainya.

Penelitian terdahulu yang relevan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mengembangkan ilmu berdasarkan judul yang sama, adapun penelitian terdahulu yang penulis dapatkan,sebagai berikut

Tabel 1
Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama Peneliti dan Judul penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Simpulan
1	Dian Purwanti, Ira Irawati, dan Josi Adiwisasta Efektifitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Jalur Prestasi pada tahun2020/2021 mengusung asas objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Melalui zistem prestasi pemerintah kota Bandung berharap semua warga kota Bandung bisa mendapatkan layanan	Terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan,harus diakui jika ditinjau dari ketepatan sasaran, implementasi kebijakan jalur prestasi pada tahun 2020/2021 lebih efektif jika dibandingkan dengan tahun 2019/2020. Artinya



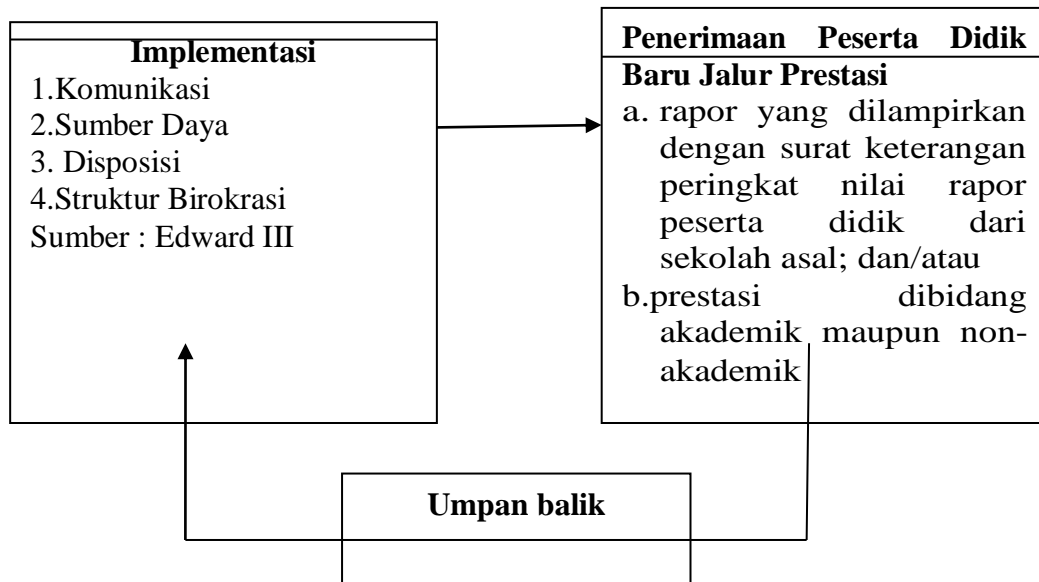
			pendidikan yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal, sehingga lebih hematwaktu, biaya transportasi, kondisi pesertadidik lebih bugaran dan terjadi pemerataan pendidikan	walaupun tidak signifikan harus diakui ada upaya dari pemerintah kota Bandung untuk memperbaiki kebijakan tersebut.
2	Aris Nurlailiyah Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta	Kualitatif	pro dan kontra dalam penerpan sistem ini menjadi problematik tersendiri, diantaranya pendapat kontra yaitu kurangnya sosialisasi di dinas pendidikan, adanya <i>blank spot</i> dan perilaku kurang disiplin siswa. Namun sisi pronya adalah sistem zonasi menghapus predikat sekolah antara favorit dan biasa, mendorong anak dekat dengan keluarga dan efisien	Di Yogyakarta sistem tersebut sudah diterapkan sejak tahun 2018. Prioritas jarak tempat tinggal sebagai penentu utama PPDB sulit diterapkan, karena jumlah sekolah untuk semua daerah belum seimbang, akibatnya beberapa sekolah yang mendapatkan murid banyak menjadi terbatas dan sekolah yang awalnya kekurangan calon peserta didik menjadi kelebihan calon siswa karena berada di zona padat
3	EkaReza Khadowni Implementasi Kebijakan Jalur Prestasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah	Kualitatif	Pada hasilnya, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Lampung Tengah mengacu kepada petunjuk teknis Keputusan Kepala Dinas tentang pelaksanaan PPDB	dibentuknya Peraturan Daerah tentang sistem zonasi belum adanya sosialisasi, belum adanya pemerataan, belum adanya penegakan kebijakan sebagai tindak lanjut dari penerapan jalur prestasi serta lemahnya pengawasan dalam penerapan jalur prestasi

Kerangka Pikir

Menurut Ady Saputra (2008 : 12) Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun yang terkait. Menurut Uma Sekaran (2003:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model

konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat, lebih terperinci dapat dilihat pada bagan 1 dibawah ini:

Gambar 1
Kerangka Pikir



PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Suatu metodologi adalah analisis teoritis tentang suatu metode namun pada dasarnya, tujuan dari semua penelitian itu sama.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2013:72) adalah merupakan pendekatan rasional yang memberikan kerangka pikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Yaitu memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Efendi,(2011: 12). Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial

Agar tidak terjadi keaburan dalam memahami penelitian ini, maka penulis kemukakan definisi konseptual masing-masing variabel dari penelitian ini.

1. Implementasi Kebijakan adalah suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah namun pelaksanaannya harus adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan suatu proses yang biasanya berada di sebuah sekolah yang digunakan untuk menyeleksi calon siswa sesuai dengan indikator yang sudah di tentukan oleh sekolah tersebut untuk menjadi anggota dalam sekolah tersebut

Definisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Effendi (2011:146). Definisi operasional berisikan



indikator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara relevan untuk variabel tersebut. Variabel yang peneliti gunakan sesuai dengan model implementasi variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan

organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik.

Analisis terhadap kebijakan tersebut, akan mengadopsi model implementasi kebijakan dari Edward III, yang meliputi beberapa indikator yaitu:

Tabel 2
Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Model Implementasi Kebijakan Edward III Sumber: Nugroho (2003: 165)	Komunikasi
	Sumber Daya
	Disposisi
	Struktur Organisasi
PPDB melalui Jalur Prestasi Sumber: Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 12 ayat (2) huruf d	c. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau d. prestasi dibidang akademik maupun non-akademik.

Sumber : Model Implementasi Edward III dan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 12 ayat (2) huruf d

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah menunjukkan pada setiap orang yang dapat menyediakan informasi rinci dan pendapat berdasarkan pengetahuan dan

pengalamannya mengenai isu atau masalah tertentu yang berhubungan dengan objek penelitian (Wirawan, 2012:205). Berdasarkan pendapat diatas. Maka, informan kunci dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang	1 orang
2.	Kabid SMP Kota Palembang	1 orang
3.	Kasi bidang SMP GTK Kota Palembang	1 orang
4.	Admin PPDB Dinas Pendidikan Kota Palembang	1 orang
5.	Waka Kesiswaan SMP Negeri 19 Palembang	1 orang
6.	Admin PPDB SMP Negeri 19 Palembang	1 orang
Jumlah		6 orang

Sumber : Kajian Penulis 2025

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang relevan (valid). Di dalam penelitian ini,

teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah berikut :

1. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dan

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang tampak pada obyek penelitian (Nawawi, 2012: 100). Hal tersebut bisa dilakukan terhadap aktivitas-aktivitas aparat/pegawai baik di dalam maupun di luar kantor, kondisi bangunan termasuk perlengkapannya, interaksi sosial, dan keadaan lokasi serta melihat proses pelayanan, kegiatan kerja, komunikasi antara aparat .

2. Wawancara yaitu untuk memperoleh keterangan maupun penjelasan dari nara sumber/informan dengan jalan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam dengan pimpinan, pegawai, dan selain itu diminta persepsi masyarakat dengan mewawancarai masyarakat yang terdiri dari; lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat,

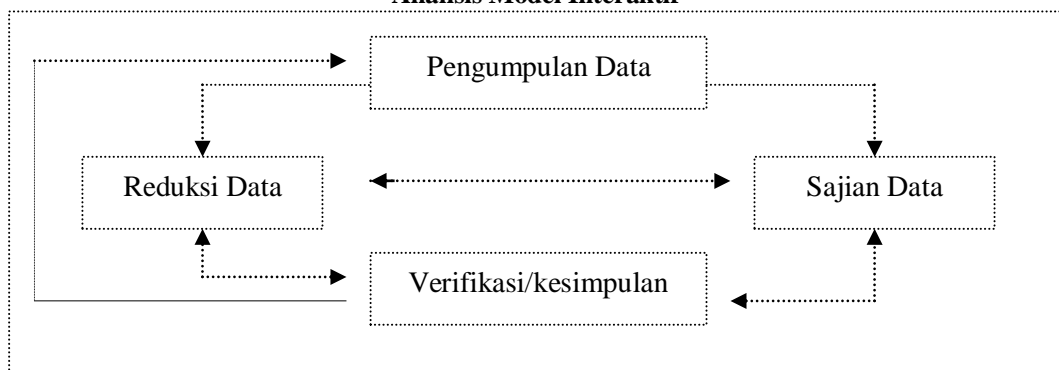
tokoh agama, dan masyarakat pengguna jasa sebagai syarat yang dijadikan sebagai responden yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data tertulis dari sumber resmi, berkaitan dengan dokumen pemerintah kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa tertulis, laporan penelitian, proposal untuk proyek, laporan kemajuan, kliping, dan artikel di media masa.
4. Studi Pustaka, yaitu Data dalam penelitian ini diambil dan bersumber dari buku-buku yang relevan dengan penelitian masalah yang bersangkutan

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan model interaktif dari Sugiyono (2013:218-219) yang meliputi tiga komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan. Proses analisis interaktif disajikan dalam bentuk gambar berikut

Gambar 4
Analisis Model Interaktif



Sumber: Sugiyono (2013:218-219)

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduksi data karenanya merupakan alat analisis, sebab tindakan-tindakan tersebut tidak lain merupakan

pilihan-pilihan analisis. Data terlebih dahulu dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya sehingga dapat membantu dalam memberi kode kepada aspek-aspek tertentu. Sebagai alat analisis, reduksi data dapat menajamkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan demikian, data yang direduksi memberi gambaran lebih



- tajam tentang hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan.
2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Membuat penyajian data juga merupakan sebuah langkah analisis data. Setelah data dibuat dalam bentuk tabel, bagan, matrik, dan grafik dilakukan tahapan dengan mendiskusikan selanjutnya memberikan penafsiran dan interpretasi. Memberikan interpretasi adalah memberikan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian.
 3. Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pemahaman atas informasi kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat serta proposisi. Untuk itu, dalam penelitian kualitatif kesimpulan-kesimpulan yang diambil dengan longgar, tetap terbuka, skeptis sifatnya meskipun kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, dan kemudian meningkat menjadi lebih rinci serta mengakar dengan kokoh. Hal tersebut, sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum. Dalam kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan sejak dimulainya proses kontak dengan unit analisis, lalu bersamaan dengan proses tersebut berlangsung kegiatan verifikasi yang kemudian menarik pokok pikiran ataupun memberi solusi dan tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian, sehingga dalam verifikasi dipikirkan kembali selama menulis ataupun suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan yang begitu seksama dan bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk membangun kesepakatan intersubjektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

5.1.1 Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Pada bagian ini penulis akan mengurangi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Implementasi

Implementasi Peraturan Pemerintah yaitu tindakan atau proses yang direncanakan agar tercapai tujuan dalam suatu keputusan kebijakan Berdasarkan teori Implementasi Peraturan Pemerintah menurut George Edward III dalam pendekatan ini terdapat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dalam kebijakan

1. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam suatu perusahaan, organisasi dan instansi sebagainya. Dalam menentukan tujuan keberhasilan komunikasi sangat penting dalam implementasi. Komunikasi sebagai alat untuk berjaln jaringan kerja dalam membangun kepercayaan antar individu ke kelompok dalam mencapai tujuan atau sasaran agar tujuan ingin dicapai dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 20 Mei 2025 dengan Bapak Andrianus Amri, S.STP., MSi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang diperoleh informasi :

“Komunikasi antara Dinas Pendidikan Kota Palembang dan sekolah-sekolah dalam penerimaan Siswa baru jalur prestasi dilaksanakan dengan baik melalui berbagai saluran, seperti pertemuan rutin, email, dan telepon”

Selanjutnya hal tersebut disampaikan oleh Ibu Kapiatul Ahliah, S.E., M.M selaku Kabid SMP Kota Palembang dalam wawancara pada tanggal 18 Mei 2025



mengenai Komunikasi diperoleh informasi :
“SMP Negeri 19 memastikan bahwa informasi tentang jalur prestasi disampaikan dengan jelas dan akurat kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti publikasi di website sekolah dan penyebaran brosur.”

Dalam komunikasi sejalan juga dengan pendapat disampaikan oleh Bapak Maju Simanjuntak, S.Pd, selaku Kasi bidang SMP Gtk Kota Palembang dalam wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 mengenai Komunikasi keterangan bahwa :
“Strategi komunikasi yang digunakan termasuk sosialisasi peraturan kepada orang tua dan masyarakat melalui berbagai media, seperti website sekolah dan media sosial.”

Hal ini didapatkan dalam wawancara dengandalam Bapak Shandy, S.Pd selaku Admin PPDB Dinas Pendidikan Kota Palembang wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh informasi:

“Kelebihan dalam komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 19 adalah adanya pertemuan rutin dan penggunaan teknologi informasi. Namun, kekurangan yang perlu diperbaiki adalah kurangnya transparansi informasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan”

Dalam komunikasi sejalan juga dengan pendapat disampaikan oleh Bapak Almirta, S.Ag, selaku Waka Kesiswaan SMP Negeri 19 Palembang dalam wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 mengenai Komunikasi diperoleh keterangan bahwa :

“Proses komunikasi antara SMP Negeri 19 dan orang tua dalam implementasi jalur prestasi sudah dilaksanakan. Kami melakukan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas implementasi jalur prestasi dan menjawab pertanyaan.”

Hal ini didapatkan dalam wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 dengan dalam Ibu Eliza S.Pd, selaku Admin PPDB SMP Negeri 19 Palembang diperoleh informasi

“Proses komunikasi antara Admin SPMB SMP Negeri 19 dan calon peserta didik/orang tua dalam implementasi jalur prestasi sudah dilaksanakan dengan baik. Kami melakukan komunikasi melalui telepon, email, dan media sosial untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan bahwa Komunikasi sangat penting dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru. Komunikasi harus memiliki kejelasan dan konsisten dalam penerapan kebijakan atau menyampaikan informasi yang diberikan menjadi faktor kunci keberhasilan dalam menjalankan kedisiplinan terhadap ketentuan jam kerja.

2. Sumber Daya

Sumber daya sangat penting dalam implementasi karena adanya ketentuan dalam mencapai tujuan dan aturan dalam suatu kebijakan. Sumber daya merupakan faktor penting bagi instansi dalam penerapan implementasi kebijakan. Keberhasilan dalam proses implementasi peraturan pemerintah tergantung dalam memanfaatkan sumber daya salah satunya sumber daya. Manusia. Sumber daya manusia yang memadai dalam wewenang serta fasilitas yang diperlukan dalam menjalani pekerjaan dan tanggung jawab dalam bidang atau tugas yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada 17 April 2025 Bapak Andrianus Amri, S.STP, MSi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang diperoleh keterangan bahwa :

“Ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam implementasi jalur prestasi sudah cukup memadai. Kami memiliki sumber daya manusia yang kompeten, teknologi informasi yang memadai, dan anggaran yang cukup untuk mendukung implementasi jalur prestasi.”

Selanjutnya hal tersebut disampaikan oleh Ibu Kapihtul Alhliah, S.E., M.M selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 diketahui bahwa:

“Sumber daya yang paling penting dalam implementasi jalur prestasi adalah sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi yang memadai. Dengan sumber

daya ini, kami dapat mengelola data dengan baik dan membuat keputusan yang tepat dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru.”

Perihal ini sejalan juga dengan pendapat disampaikan oleh Bapak Maju Simanjuntak, S.Pd, selaku Kasi bidang SMP GTK dalam wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa:

“Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, Dinas Pendidikan Kota Palembang dapat meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengoptimalkan proses seleksi penerimaan peserta didik baru.”

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 dengan bapak Shandy, S.Pd selaku Admin SPMB Dinas Pendidikan Kota Palembang diperoleh informasi:

“Dinas Pendidikan kota Palembang mengelola sumber daya yang ada dengan memprioritaskan penggunaan teknologi informasi untuk mengoptimalkan proses seleksi penerimaan peserta didik baru. Kami juga memiliki tim yang kompeten untuk mengelola data dan membuat keputusan yang tepat.”

Perihal ini sejalan dengan pendapat disampaikan oleh Bapak Amil selaku Waka Kesiswaan SMP Negeri 19 Palembang dalam wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh keterangan :

“sebagai pihak yang mengelola sumber daya yang ada di SMP Negeri 19 dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi yang memadai untuk mendukung implementasi jalur prestasi.”

Hal ini didapatkan dalam wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 dengan dalam Ibu Eliza ,S.Pd selaku Admin SPMB SMP Negeri 19 Palembang diperoleh dari:informasi

“Pengelolaan sumber daya yang ada dengan memprioritaskan penggunaan teknologi informasi untuk mengoptimalkan proses seleksi penerimaan peserta didik baru. Kami juga memiliki tim yang kompeten untuk mengelola data dan membuat keputusan yang tepat.”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sumber daya dalam Implementasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sudah baik karena dilihat dari pelayanan para pegawainya sudah melayani dengan sopan dan ramah serta dalam segi pengolahan data dalam kebijakan jalur prestasi penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 19 Palembang sudah baik.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Menurut Bapak Andrianus Amri, S.STP,. M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam wawancara pada tanggal 20 April 2025 diperoleh informasi:

“Dinas Pendidikan Kota Palembang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengkoordinasikan implementasi jalur prestasi di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Tim bekerja sama dengan sekolah-sekolah SMP untuk memastikan bahwa jalur prestasi diimplementasikan dengan baik.”

Selanjutnya hal tersebut disampaikan oleh Ibu Kapiahtul Alhliah, S.E,. M.M selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang pada wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 mengenai disposisi diperoleh informasi :

“Dinas Pendidikan Kota Palembang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengkoordinasikan implementasi jalur prestasi di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Panitia dan tim bekerja sama dengan sekolah-sekolah SMP untuk memastikan bahwa jalur prestasi diimplementasikan dengan baik.”

Perihal tersebut sejalan juga dengan pendapat disampaikan oleh Bapak Maju Simanjuntak, S.Pd, selaku Kasi bidang SMP



GTK Kota Palembang dalam wawancara pada tanggal 18 Mei mengatakan :

“Kasi Bidang SMP GTK, memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengawasi implementasi jalur prestasi di tingkat SMP. tim bekerja sama dengan sekolah-sekolah SMP untuk memastikan bahwa jalur prestasi diimplementasikan dengan baik.”

Hal ini didapatkan dalam wawancara dengandalam Bapak Shandy, S.Pd, selaku Admin PPDB Dinas Pendidikan Kota Palembang pada wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh informasi: “Disposisi sebagai Admin PPDB adalah untuk memastikan bahwa implementasi jalur prestasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya bekerja sama dengan sekolah-sekolah SMP untuk memastikan bahwa jalur prestasi diimplementasikan dengan baik.”

Dalam diposisi sejalan juga dengan pendapat disampaikan oleh Bapak Almi, S.Ag, selaku Waka Kesiswaan SMP Negeri 19 Palembang dalam wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 mengenai disposisi diperoleh informasi :

“Disposisi sebagai Waka Kesiswaan adalah untuk memastikan bahwa implementasi jalur prestasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru untuk memastikan bahwa jalur prestasi diimplementasikan dengan baik.”

Hal ini didapatkan dalam wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 dengan dalam Ibu Eliza ,S.Pd selaku Admin SPMB SMP Negeri 19 Palembang diperoleh informasi

Dalam menangani masalah yang timbul selama proses implementasi jalur prestasi dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dan tim juga melakukan analisis data dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa implementasi jalur prestasi berjalan dengan lancar”

Berpedoman penjelasan hasil wawancara penulis dapat menjelaskan bahwa Terkait Disposisi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,

Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi. Disposisi atau sikap para pegawai dan staf sesuai aturan yang diterapkan dan sikap para pegawai sangat baik dan sesuai prosedur dalam melaksanakan peraturan yang diterapkan dan menjadi acuan utama dalam attitude atau berakhlak hati suci dan sudah sepenuhnya menaati peraturan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan keijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 dengan bapak Andrianus Amri, S.STP, M.Si, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang diperoleh informasi :

“Struktur birokrasi di Dinas Pendidikan Kota Palembang terdiri dari beberapa unit kerja yang terkait dengan implementasi jalur prestasi, seperti Bidang SMP dan Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan. dan beberapa bidang yang bekerja sama untuk mengimplementasikan jalur prestasi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kapihtul Alhiah, S.E., M.M selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang pada wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 mengenai disposisi diperoleh informasi :

“Struktur birokrasi di Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang terdiri dari beberapa unit kerja yang terkait dengan implementasi jalur prestasi, seperti Seksi Kurikulum dan Seksi Kesiswaan. Kami memiliki kepala bidang, kepala seksi, dan staf yang bekerja sama untuk mengimplementasikan jalur prestasi.”

Hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 dengan Bapak Maju Simanjuntak,

S.Pd sebagai Kasi bidang SMP GTK Kota Palembang diperoleh keterangan bahwa:

“Struktur birokrasi di Bidang SMP GTK Dinas Pendidikan Kota Palembang terdiri dari beberapa unit kerja yang terkait dengan implementasi jalur prestasi, seperti Seksi GTK dan Seksi Sarana Prasarana. Kami memiliki kepala seksi dan staf yang bekerja sama untuk mengimplementasikan jalur prestasi.”

Hal ini didapatkan dalam wawancara dengan Bapak Shandy, S.Pd, selaku Admin PPDB Dinas Pendidikan Kota Palembang pada wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh informasi:

Struktur birokrasi di Dinas Pendidikan Kota Palembang terdiri dari beberapa unit kerja yang terkait, seperti Bidang SMP dan SPMB. Kami memiliki kepala dinas, sekretaris dinas, dan beberapa bidang yang bekerja sama untuk mengimplementasikan jalur prestasi.”

Hasil wawancara dengan Bapak Almi, S.Ag, sebagai Waka Kesiswaan SMP Negeri 19 Palembang pada wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh keterangan “Proses penerimaan peserta didik baru dengan jalur prestasi di SMP Negeri 19 Palembang dilakukan dengan menentukan jenis prestasi oleh dinas pendidikan dan sekolah. Sekolah wajib menerima calon siswa yang berprestasi dengan persentase tertentu dari jumlah siswa yang akan diterima.

Berpedoman dari hasil wawancara pada wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 dengan Ibu Eliza Aptayani, S.Pd selaku Admin SPMB SMP Negeri 19 Palembang diperoleh informasi:

“Struktur birokrasi dalam implementasi jalur prestasi di SMP Negeri 19 Palembang melibatkan Dinas Pendidikan Kota Palembang dan sekolah itu sendiri. Dinas Pendidikan Kota Palembang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan mengawasi pelaksanaan sistem domisili, sedangkan sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan SOP yang berlaku sesuai dengan acuan dan kebijakan seperti surat edaran yang berlaku, Undang-undang sesuai landasan dan SOP yang dirancang oleh ruang lingkup Dinas Pendidikan Kota

Palembang.

Kebijakan Jalur Prestasi

Jalur prestasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sistem ini sangat bermanfaat untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan, sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan. Menurut (Mahpudin, 2020) Kebijakan jalur prestasi merupakan aturan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA).

1. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal.

Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal merupakan dokumen persyaratan penting untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur Prestasi Akademik. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti resmi atas prestasi akademik peserta didik, dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah asal untuk menguatkan dan memberikan keabsahan data nilai dalam rapor

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 dengan Ibu Kapiatul Ahliyah, S.E., M.M, selaku Kabid SMP Kota Palembang mengenai diperoleh informasi

“Kami melakukan verifikasi dokumen rapor dengan memeriksa keaslian dokumen dan memastikan bahwa data di rapor sesuai dengan data yang diinput dalam sistem sekolah. Jika terdapat ketidaksesuaian, kami akan meminta klarifikasi dari orang tua atau wali siswa.”

Hasil wawancara penulis pada tanggal 18 Mei dengan Bapak Maju Simanjuntak, S.Pd, selaku Kasi bidang SMP Gtk Kota Palembang diketahui bahwa:

“Jika terdapat ketidaksesuaian, kami akan meminta klarifikasi dari orang tua atau wali siswa untuk memastikan bahwa data yang diinput dalam sistem sekolah akurat. Kami juga akan memastikan bahwa dokumen rapor diperiksa untuk memverifikasi keaslian data.



Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 dengan Bapak Shady, S.Pd, sebagai Admin Diknas Pendidikan Kota Palembang peroleh keterangan “Kami melakukan verifikasi dokumen rapor dengan memeriksa keaslian dokumen dan memastikan bahwa data di rapor sesuai dengan data yang diinput dalam sistem PPDB. Jika terdapat ketidaksesuaian, kami akan meminta klarifikasi dari orang tua atau wali siswa.”

Hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 dengan Bapak Almi, S.Ag, sebagai Waka Kesiswaan SMP Negeri 19 Palembang diketahui bahwa “Sebagai Waka Kesiswaan, membantu memverifikasi dokumen-dokumen siswa baru, termasuk rapor, untuk memastikan keabsahan data siswa dan menghindari masalah di kemudian hari.”

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 dengan Ibu Eliza Aptayani, S.Pd, selaku Admin PPDB SMP Negeri 19 Palembang diperoleh keterangan

“Kami melakukan verifikasi dokumen rapor dengan memeriksa keaslian dokumen dan memastikan bahwa data di rapor sesuai dengan data yang diinput dalam sistem SPMB. Jika terdapat ketidaksesuaian, kami akan meminta klarifikasi dari orang tua atau wali siswa.”

2. Prestasi dibidang akademik maupun non-akademik

Syarat prestasi untuk masuk SMP jalur prestasi mencakup: prestasi akademik seperti nilai rapor 5 semester terakhir atau juara di bidang sains/teknologi, dan prestasi non-akademik seperti menjadi ketua OSIS/Pramuka, atau juara di bidang seni, olahraga, atau budaya. Bukti yang diperlukan umumnya adalah rapor yang dilegalisir, sertifikat/piagam, dan surat keterangan (SPTJM) dari sekolah asal

Hasil wawancara penulis pada tanggal 20 April 2025 dengan Bapak Andrianus Amri, S.STP, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang diperoleh informasi :

“Untuk penerimaan siswa jalur akademik dan akademik kami telah meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi untuk mencegah manipulasi data dan praktik pungli. Selain itu, kami juga menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus

penyimpangan seperti pemalsuan bukti prestasi calon siswa.”

Selanjutnya hal tersebut disampaikan oleh Ibu Kapiatul Ahliah, S.E., M.M, selaku Kabid SMP Kota Palembang dalam wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh keterangan:

“Seleksi jalur prestasi akademik dan non akademik menunjukkan bahwa kebijakan ini telah membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan bagi siswa di Kota Palembang namun dalam hal ini prestasi akademik dan akademik harus terverifikasi secara baik.”

Perihal sesuai dengan pendapat disampaikan oleh Bapak Maju Simanjuntak, S.Pd, selaku Kasi bidang SMP GTK Kota Palembang pada wawancara tanggal 18 Mei 2025 mengatakan :

“Sebagai Kasi Bidang SMP, saya membantu memastikan bahwa jalur prestasi berjalan dengan efektif dan efisien, serta memantau dan mengevaluasi proses SPMB seperti memastikan keabsahan bukti prestasi yang diajukan oleh calon siswa.”

Hasil wawancara penulis pada tanggal 18 Mei 2025 dengan Bapak Shady, S.Pd, sebagai Admin Diknas Pendidikan Kota Palembang diperoleh keterangan :

“Untuk melihat hasil seleksi, Anda dapat mengunjungi situs (tautan tidak tersedia), login menggunakan email dan password, serta pilih login sebagai orang tua/siswa. Kemudian, pilih menu hasil seleksi, pilih jalur pendaftaran yang diikuti, kecamatan, dan nama sekolah. Setelah itu, akan muncul daftar nama peserta didik yang sudah diverifikasi dan lolos seleksi SPMB.”

Dan pernyataan dalam wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 dengan Bapak Almirta, S.Ag, sebagai jabatan Waka Kesiswaan SMP Negeri 19 Palembang didapat keterangan bahwa

“Kriteria penilaian dalam jalur prestasi di SMP 19 Kota Palembang adalah sertifikat sebagai pemenang lomba baik tingkat kota, provinsi maupun nasional atau surat keterangan dari sekolah asal mengenai organisasi yang diikuti oleh calon siswa.”

Hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2025 dengan dalam Ibu Eliza Aptayani, S.Pd, selaku Admin PPDB SMP Negeri 19 Palembang mengatakan :

“Jika terdapat ketidaksesuaian bukti prestasi akademik maupun non akademik, maka



panitia SPMB akan meminta klarifikasi dari orang tua atau wali siswa dan memastikan bahwa data yang diinput dalam sistem SPMB akurat dan sesuai dengan dokumen yang diunggah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis dapat menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) di SMP Negeri 19 Palembang masih ada kendala pada bukti akademik dan non akademik sehingga tidak bisa diproses untuk ikut mendaftar pada jalur prestasi

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru, maka pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut

Implementasi Kebijakan

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan peran penting dalam berlangsungnya implementasi, koordinasi tidak hanya sekedar tentang informasi persoalan mengkomunikasikan maupun membentuk struktur-struktur administrasi yang kompleks, melainkan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), ada tiga hal yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

a. Transmisi dapat Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa transmisi yang dilakukan oleh SMP Negeri 19 Palembang dalam mentransmisikan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Studi Pada Sekolah Menengah Pertama 19 Kota Palembang Pasal 12 Ayat 2 Huruf (D) Jalur Prestasi. Dapat disimpulkan bahwa transmisi yang

dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Palembang sudah baik, dapat dilihat dengan kepala sekolah mengadakan rapat, kepada semua Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam menjelaskan isi dan tujuan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan tersebut, dan memberikan surat edaran kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) tentang jadwal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Palembang. Sehingga memberikan dampak baik kepada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) terbukti dengan orang tua peserta didik yang diterima dapat mengakses informasi dari seperti pihak sekolah SMP dan SD asal.

b. Kejelasan, Berdasarkan penelitian tersebut Kepala SMP Negeri 19 Palembang sudah menjelaskan kepada semua Kepala SD Negeri yang ada disekitar domisili SMP Negeri 19 Palembang dan Guru beserta Staf SMP Negeri 19 Palembang dengan memberikan surat edaran tentang jadwal dan prosedur pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 19 Palembang. Dapat disimpulkan bahwa Kepala SMP Negeri 19 Palembang sudah menjelaskan kepada semua Kepala SD Negeri yang ada disekitar domisili SMP Negeri 19 Palembang dan Guru beserta Staf SMP Negeri 19 Palembang dengan memberikan surat edaran tentang jadwal dan prosedur pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 19 Palembang. Dapat dilihat dari pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang dibuat. Adapun hasil baiknya yaitu dapat dilihat dari orang tua peserta yang telah diterima tidak kesulitan mendapatkan informasi dan dapat mengetahui prosedur dan syarat-syarat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

2. Konsistensi

Dari hasil penelitian bahwa Kepala Sekolah, seluruh guru dan staf sudah menerima dan melaksanakan Peraturan



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dengan melaksanakan pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan baik dari awal hingga akhir pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa Kepala Sekolah, seluruh guru dan staf sudah menerima dan melaksanakan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dengan baik dari awal hingga akhir pelaksanaannya dan tidak merubah kebijakan atau prosedur yang telah dibuat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa komunikasi yang dilakukan Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Palembang sudah baik, dapat dilihat dengan kepala sekolah mengadakan rapat, kepada semua Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam menjelaskan dengan mengadakan rapat, kepada semua Kepala Sekolah Dasar (SD) dalam menjelaskan isi dan tujuan dari Peraturan menteri tersebut, dan memberikan surat edaran kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) tentang jadwal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Palembang. Menjelaskan kepada semua Kepala SD Negeri yang ada disekitar domisili SMP Negeri 19 Palembang dan Guru beserta Staf SMP Negeri 19 Palembang dengan memberikan surat edaran tentang jadwal dan prosedur pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 19 Palembang.

Dapat dilihat dari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dibuat. Sehingga pelaksanaan Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah dibuat.

3. Sumber Daya

Menurut pendapat Mangkunegara, sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber daya manusia atau panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sudah cukup baik. Dimana panitianya berjumlah 10 orang yaitu terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Bendahara Sekolah, Guru, Operator Sekolah, dan Tata Usaha. yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Pembagian Tugas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dapat disimpulkan bahwa panitia pelaksanaan sudah cukup untuk melaksanakan Penerimaan Murid baru sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Adapun dampak baik yang dihasilkan oleh sumber daya manusia atau panitia pelaksana Penerimaan Murid baru di SMP 26 tugas yang diberikan sudah sesuai dengan surat keputusan pembagian tugas yang dibuat oleh Kepala Sekolah sehingga SPMB terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil, penelitian, bahwa struktur birokrasi dalam SOP pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. Pihak Sekolah SMP Negeri 19 Palembang sudah memberikan alur pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru. Dapat di lihat SOP yang berjalan di SMP Negeri 19 Palembang sudah baik, berdasarkan salah satu contoh alur prosedur penerimaan

peserta didik baru berikut ini :

1. pendaftar mendaftarkan secara online pada <https://portal-spmb.palembang.go.id/login>
2. panitia memverifikasi berkas dengan mengecek keaslian serta kelengkapan dan mengecek titik koordinat antara rumah pendaftar dengan sekolah.
3. Kepala Sekolah dan panitia mengecek ulang secara online

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan fragmentasi sudah berjalan dengan baik sehingga koordinasi sangatlah penting, mengingat tanggung jawab harus dilaksanakan sesuai dengan tugas yang telah diberikan sesuai dengan surat pembagian tugas masing-masing panitia SPMB. Dan dari hasil penelitian bahwa benar semua pelayanan dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah berlaku sehingga dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat dari awal hingga akhir dalam pelaksanaannya karena adanya koordinasi yang benar dari Kepala Sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan, bahwa: Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan sudah baik, karena dilihat dari komunikasinya sudah jelas, sumber dayanya, baik dari SDM, dana, Remaja Rosdakarya.

maupun fasilitas sudah memadai. Kemudian dari disposisi semua pihak yang terlihat dalam SPMB menerima dengan baik Peraturan menteri tersebut. Selanjutnya dalam struktur birokrasi ada SOP dan pembagian tugas, hal ini terdapat pada pelaksanaan SPMB dengan jalur prestasi sudah 25% peserta dari jalur prestasi.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran yaitu Agar kiranya Dinas Pendidikan kota Palembang untuk memperkuat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah agar tidak terjadi penumpukan pendaftar pada sekolah tertentu. Selain itu, sistem verifikasi perlu diperketat melalui kerja sama dengan instansi terkait guna mencegah praktik manipulatif yang merusak asas keadilan dalam jalur prestasi dan SMPN 19 Palembang/Sekolah Pihak sekolah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan informasi dan pendampingan selama proses SPMB, baik secara daring maupun langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Fuchan. 2004. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Benty, Djum-Djum Noor dan Imam Gunawan. 2017. *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Burhanuddin, A Imron. 2003. *Manajemen Pendidikan: Analisis Substantif dan Aplikasinya Dalam Latar Belakang Institusi Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Hadiyanti, Rini. 2013. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*. 985-997 ISSN 2338-3615 Vol. 1 No 3.
- Hermawan, Dafit. 2014. *Manajemen Kesiswaan Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Mathla'ul Anwar Ciubar Kelumbayan*.
- Imron, Ali. 2011. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, Asep. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.



- Sallis Edward, *Total Quality Management In Education*. Jogjakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Subroto, Suryo. 2013. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Bandung: Rineka Cipta.
- Suharsimi, Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta.
- Tim Sinar Grafika. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tupik. 2013. *Manajemen Peserta Didik Dalam Pembinaan Perilaku Keberagamaan di Madrasah Aliyah*.